

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dan perubahan jaman dewasa ini telah membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan dan budaya manusia, yang selanjutnya mengarah pada kondisi tingginya tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Kondisi ini melahirkan adanya monopoli atas sumber-sumber daya oleh kalangan yang secara struktural maupun kultural 'dominan' atau 'mampu', dimana secara kuantitas kalangan ini belum tentu lebih banyak dibandingkan dengan kalangan 'minor' atau 'tidak mampu'. Marx melalui konsep kelas sosial mengemukakan bahwa kalangan dominan yang keberadaannya dikuatkan oleh strukturisasi dominasi kekuasaan akan cenderung mempengaruhi dan mengatur kalangan minor yang posisinya 'dikalahkan'. Keniscayaan yang muncul kemudian adalah kalangan minor ini akan menggalang kekuatan untuk mengalahkan kekuatan dominan hingga menang. Permasalahannya, pada prakteknya kalangan minor atau kelompok yang termarginalisasi ini tidak cukup kuat dan mudah menembus sistem struktur kekuasaan yang telah dibangun kalangan dominan. Dalam situasi ini, sistem advokasi perlu dibangun untuk memberikan kekuatan bagi kelompok marginal tersebut, yang tentu saja berbeda dengan pengertian advokasi dalam ranah hukum.

Miller dan Covey (2005: 11-12) mengemukakan bahwa advokasi berkaitan dengan upaya mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik. Dalam konteks ini, Miller dan Covey menegaskan bahwa advokasi merupakan proses perubahan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan-hubungan kekuasaan yang lebih demokratis di masyarakat, menjamin kelompok masyarakat

marginal mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman dan produktif bagi kehidupan mereka. Sedangkan Roem Topatimasang et al. (2005) mengemukakan bahwa advokasi merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju.

Salah satu kelompok masyarakat marginal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kelompok difabel, atau orang berkemampuan berbeda. Terminologi ini digunakan untuk membangun sudut pandang positif terhadap mereka yang kerap kali menjadi cacat karena adanya proses pencacatan secara struktural maupun kultural di masyarakat. Bahkan berdasarkan rekomendasi *World Health Organization (WHO)*, melalui *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)* tahun 1980, telah dikemukakan bahwa *impairment*, *disability*, dan *handicap* dimaknai sebagai sebuah kondisi ketidakberuntungan seseorang dalam proses interaksi sosialnya (Albrecht et al., 2001: 128). Di samping itu, terkait dengan proses pembangunan, difabel cenderung dipandang sebagai kelompok manusia yang tidak mampu karena diletakkan dalam kategori tidak produktif dan tidak memenuhi nilai-nilai yang diutamakan dalam pembangunan, yaitu efektif dan efisien, sehingga mereka tidak dianggap sebagai sumberdaya atau investasi pembangunan (Setia Adi Purwanta, 2002: 109-110). Pandangan inilah yang pada akhirnya akan mematikan potensi dan menutup akses difabel untuk memperoleh hak-haknya. Sehingga pada situasi ini, perlu adanya langkah advokasi bagi difabel, yang tentunya dibangun dengan baik.

Proses advokasi hak-hak difabel sejatinya merupakan proses pembentukan pandangan, penggalangan opini dan sumber-sumber kekuatan, hingga pengorganisasian serangkaian aksi atas upaya advokasi hak-hak difabel. Maka, menjadi penting pula untuk melihat bagaimana media berperan dalam hal ini, mengingat media merupakan salah satu komponen yang

diperlukan dalam advokasi. Althusser dalam Alex Sobur (2006: 30) menjelaskan, media memiliki posisi strategis terkait fungsinya sebagai alat legitimasi kekuasaan, dimana merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus*). Namun menurut Gramsci dalam Alex Sobur (2006: 30), media berpotensi menumbuhkan pertarungan antar ideologi yang saling berkompetisi, karena media merupakan ruang representasi ideologi. Media dapat digunakan sebagai alat untuk membangun kultur dan ideologi bagi kepentingan kelas dominan, namun sekaligus juga dapat digunakan sebagai instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Jenis media yang berkembang di Indonesia cukup beragam. Dilihat dari formatnya, dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk cetak, elektronik, hingga media *online*. Sedangkan dilihat dari kepemilikan dan pengelolaannya, dapat dikategorikan menjadi media publik, swasta, hingga media komunitas. Perkembangan media tidak dapat dipisahkan dari adanya kekuatan penguasa sistem ataupun pemilik modal di balik operasionalisasi media yang bersangkutan. Hal ini berimplikasi pada bentuk program acara yang disuguhkan ke hadapan khalayak, yang merupakan representasi dari siapa dan bagaimana sebenarnya media tersebut memandang masyarakat. Realitas medialah yang kemudian akan terbaca oleh masyarakat, termasuk bagaimana wacana tentang kelompok marginal –dalam hal ini khususnya adalah difabel– ditangkap oleh masyarakat. Dengan demikian, menjadi penting kiranya bagi media untuk dapat memberi ruang informasi dan diskusi bagi masyarakat terkait wacana tentang keberadaan difabel, dan juga sebaliknya, memberi ruang artikulasi bagi difabel dalam upaya meningkatkan potensi diri mereka. Konsepsi tersebut penting untuk dipahami oleh para pelaku media, baik media publik, swasta, maupun komunitas.

Sensitivitas atau kepekaan media –khususnya lembaga penyiaran radio– di Kota Surakarta terhadap advokasi difabel menjadi menarik untuk digali, mengingat secara historis, Kota Surakarta memiliki keterkaitan erat dengan sejarah cikal bakal lahirnya radio di Indonesia, dan juga menjadi salah satu rujukan dasar tentang pergerakan difabel di Indonesia. Kota Surakarta – dengan jumlah difabel saat ini mencapai 1.398 jiwa (sumber: Surakarta Dalam Angka Tahun 2011)– merupakan salah satu kota barometer difabel di Indonesia, mengingat salah satu pusat rehabilitasi difabel rujukan nasional – Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso– terdapat di kota ini, di samping pusat rehabilitasi serupa bernama Wiyataguna yang terdapat di Bandung (Setia Adi Purwanta dalam Muhammad Joni Yulianto, 2008: 25). Bahkan, keberadaan pusat rehabilitasi tersebut dimungkinkan menjadi salah satu penyebab besarnya jumlah difabel di Kota Surakarta ini (Sofrah et al., artikel belum dipublikasikan). Di samping itu, Kota Surakarta juga tercatat sebagai salah satu kota pionir dalam sejarah lahirnya organisasi difabel di Indonesia. Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) adalah salah satu organisasi difabel yang lahir pada tahun 1966 di Surakarta (Ariani dalam Muhammad Joni Yulianto, 2008: 27). Kota Surakarta juga tercatat pernah menjadi tuan rumah *The 6th ASEAN Para Games* pada tahun 2011 lalu, yaitu sebuah ajang kompetisi berbagai cabang olah raga bagi difabel se-ASEAN.

Besarnya jumlah difabel di Kota Surakarta beserta histori kota tersebut seyogyanya dapat menjadikan kota ini sebagai rujukan penciptaan model lingkungan yang aksesibel dan inklusif bagi difabel. Namun, realitas yang ada justru masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi oleh difabel itu sendiri, salah satunya adalah rendahnya pemenuhan hak atas kesempatan kerja bagi difabel di Kota Surakarta (Sofiah et al., artikel belum dipublikasikan), meski Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

Meski upaya advokasi difabel melalui media radio pernah pula hadir di Kota Surakarta melalui satu-satunya radio komunitas difabel bernama Radio Suara Difabel (RSD) FM yang pernah beroperasi selama empat tahun pada 2006 hingga 2009, hal itu belumlah cukup membawa difabel di kota ini menuju pencapaian sebuah cita-cita berupa perwujudan lingkungan yang aksesibel dan inklusif bagi kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Kondisi demikian memerlukan adanya sikap keberpihakan yang mendukung aktualisasi mereka sebagai anggota masyarakat sebagaimana mestinya. Langkah ini perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah media, meski terdapat suatu keniscayaan bahwa masing-masing media tidak dapat sepenuhnya dituntut untuk memiliki sensitivitas sedemikian rupa terhadap seluruh isu marginal yang ada di masyarakat, mengingat masing-masing media memiliki orientasi kepentingan yang berbeda.

Sebagaimana hakikat dari advokasi itu sendiri, bahwa komunitas marginal –pada tataran tertentu– dituntut untuk dapat berdaya dan mandiri dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih berpihak bagi kehidupan mereka. Ketika proses advokasi –melalui media– tidak dirancang dengan baik, maka tujuan dan cita-cita dari advokasi itu sendiri juga akan gagal. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mengenai bagaimana sensitivitas lembaga penyiaran radio terhadap advokasi difabel di Kota Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana sensitivitas lembaga penyiaran radio, baik lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas di Kota Surakarta terhadap advokasi difabel?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai permasalahan tentang sensitivitas lembaga penyiaran radio di Kota Surakarta terhadap advokasi difabel.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan bidang Ilmu Komunikasi, khususnya berkaitan dengan kajian teori tentang media sebagai alat advokasi bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengelolaan program media secara umum; sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis oleh para peneliti; dan juga sebagai penambah pengetahuan tentang pemanfaatan media dalam upaya advokasi bagi para pembaca pada umumnya.